



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN**  
**RAKYAT DAN PERMUKIMAN**

Jl. Negara KM 11 Sarilamak Kecamatan Harau Telp / Fax (0752) 7750578

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN**  
**(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**  
**NOMOR 17 /SK/DLHPP-LK/VI/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 12/SK/DLHPP-LK/III/2022 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 01.a/SK/DLHPP-LK/I/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK OPD), PEJABAT PEMBANTU PENATAUSAHAAN KEUANGAN (Pembantu PPK OPD) PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (Rutin) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya rotasi dan mutasi pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan Juni tahun 2022 maka dipandang perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Selaku Pengguna Anggaran Nomor 12/SK/DLHPP-LK/III/2022 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Selaku Pengguna Anggaran Nomor 01.a/SK/DLHPP-LK/I/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK OPD), Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK OPD) Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Rutin) Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851));
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 93).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK OPD), Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK OPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Rutin) Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## KEDUA

1. PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menyusun perencanaan Pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA meliputi :
    - 1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
    - 2) Penetapan barang/jasa yang dibutuhkan;
    - 3) Cara pengadaan barang/jasa;
    - 4) Jadwal pengadaan barang/jasa yang direncanakan;
    - 5) Anggaran pengadaan.
  - b. Melaksanakan persiapan pengadaan, meliputi :
    - 1) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - 2) Menetapkan HPS;
    - 3) Menetapkan rancangan kontrak; dan/atau;
    - 4) Menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga;
  - c. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;;
  - d. Menetapkan Tim pendukung;
  - e. Menetapkan Tim atau tenaga ahli;
  - f. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - g. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  - h. Mengendalikan Kontrak;
  - i. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - l. Menilai kinerja penyedia;
  - m. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
    - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelularan anggaran belanja; dan
    - 4) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
2. PPTK memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  - d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. Melakukan verifikasi SPP;
  - d. Menyiapkan SPM;
  - e. Melakukan verifikasi harian data penerimaan;
  - f. Melaksanakan akuntansi OPD;
  - g. Menyiapkan laporan keuangan OPD.
4. Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

Membantu melaksanakan tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan

5. Pembantu Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai berikut:  
Membantu melaksanakan tugas-tugas Bendaharawan Pengeluaran yang mencakup pembukuan, pembuat daftar gaji dan tugas-tugas lainnya.
6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Rutin) memiliki tugas sebagai berikut :  
Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling Banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 2 Juni 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Selaku Pengguna Anggaran



**Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si**  
Nip. NIP. 19690622 199701 2 001

Tembusan :disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala BK Kab. Lima Puluh Kota
3. Sdr. Inspektur Kab. Lima Puluh Kota
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Lima Puluh Kota
5. Sdr. Yang bersangkutan
6. Arsip.....

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 17 /SK/DLHPP-LK/VI/2022

TANGGAL : 2 JUNI 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 12/SK/DLHPP-LK/III/2022 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN  
PERMUKIMAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 01.a/SK/DLHPP-LK/I/2022  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT  
PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
(PPK OPD), PEJABAT PEMBANTU PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
(Pembantu PPK OPD) PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT  
PENGADAAN BARANG/JASA (Rutin) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN  
ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN /URAIAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
<b>A.</b>	<b>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>		
1.	Hj. Yunire Yunirman, ST, M.Si Nip. 19690622 199701 2 001	<b>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>	<b>5,769,309,119</b>
		<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,116,682,119</b>
		<b>I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18,070,000</b>
		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	18,070,000
		<b>II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,648,468,104</b>
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,389,471,104
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57,600,000
		3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201,397,000
		<b>III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>260,364,200</b>
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,945,000
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,050,000
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,262,600
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54,399,100
		5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	40,457,500
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,250,000
		<b>IV. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>38,707,600</b>
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,720,000
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,480,000
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,507,600
		<b>V. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151,072,215</b>
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,072,215
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000
		<b>B. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>95,670,000</b>
		<b>I. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>95,670,000</b>
		1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	95,670,000
		<b>C. PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1,473,059,000</b>
		<b>I. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1,473,059,000</b>

NO	NAMA / NIP	JABATAN / URAIAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
			1,375,459,000
		1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	97,600,000
		2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5,540,000
		<b>D. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	5,540,000
		<b>I. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	5,540,000
		1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	45,875,000
		<b>E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN</b>	45,875,000
		<b>I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH</b>	35,850,000
		1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10,025,000
		2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22,480,000
		<b>F. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	22,480,000
		<b>I. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	22,480,000
		1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	10,003,000
		<b>G. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	10,003,000
		<b>I. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	10,003,000
		1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10,003,000
			9,190,460,000
2	Yuniwal MT, SE Nip. 19720613 199203 1 002	<b>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>	
		<b>A. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	1,454,361,000
		<b>I. Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	1,454,361,000
		3 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,390,144,000
		4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	18,437,000
		5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	45,780,000
		<b>B. PROGRAM PENGEDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	12,000,000
		<b>I. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	12,000,000
		1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	12,000,000
		<b>C. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	7,724,099,000
		<b>I. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	7,724,099,000
		1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7,724,099,000
3	Rifki Satria, ST NIP. 19750919 200312 1 004	<b>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>	7,326,881,000
		<b>A. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	223,904,000
		<b>I. Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	10,010,000

NO	NAMA / NIP	JABATAN / URAIAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
		1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	10,010,000
		<b>II. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>213,894,000</b>
		1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	63,894,000
		2 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	150,000,000
		<b>B. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>4,549,489,800</b>
		<b>I. Kegiatan Penetaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>9,625,000</b>
		1 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	9,625,000
		<b>II. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>4,539,864,800</b>
		1 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	4,539,864,800
		<b>C. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>2,553,487,200</b>
		<b>I. kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>2,553,487,200</b>
		1 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2,543,667,200
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	9,820,000
	<b>B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>		<b>4,116,682,119</b>
1	Edmil S.Sos NIP. 19741028 2000212 1 002	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Sekretariat</b>	<b>4,116,682,119</b>
		<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>18,070,000</b>
		<b>I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18,070,000</b>
		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,648,468,104
		<b>II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,389,471,104</b>
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57,600,000
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201,397,000
		3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>260,364,200</b>
		<b>III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2,945,000</b>
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	22,050,000
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,262,600
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54,399,100
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,457,500
		5 Fasilitas Kunjungan Tamu	83,250,000
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>38,707,600</b>
		<b>IV. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3,000,000</b>
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,720,000
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,480,000
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,507,600
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>151,072,215</b>
		<b>V. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>118,072,215</b>
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	3,000,000
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	<b>154,000,000</b>
2	Susy Herlinda, S.Pt, M.Si Nip. 19710307 199701 2 001	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perencanaan Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas LH</b>	<b>95,670,000</b>
		<b>A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	

NO	NAMA / NIP	JABATAN / URAIAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
		<b>I. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>95,670,000</b>
		1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	95,670,000
		<b>B. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>35,850,000</b>
		<b>I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35,850,000</b>
		1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	35,850,000
		<b>C. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>22,480,000</b>
		<b>I. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22,480,000</b>
		1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	22,480,000
			<b>1,401,027,000</b>
3	Maradona, SH Nip. 19790828 200901 1 010	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum LH</b>	<b>1,375,459,000</b>
		<b>A. PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1,375,459,000</b>
		<b>I. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1,375,459,000</b>
		1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1,375,459,000
		<b>B. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>5,540,000</b>
		<b>I. Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>5,540,000</b>
		1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	5,540,000
		<b>C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>10,025,000</b>
		<b>I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10,025,000</b>
		1 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,025,000
		<b>D. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>10,003,000</b>
		<b>I. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>10,003,000</b>
		1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10,003,000
			<b>97,600,000</b>
4	Sri Midarti, SKM Nip. 19761010 200501 2 012	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>97,600,000</b>
		<b>A. PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>97,600,000</b>
		<b>I. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>97,600,000</b>
		1 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	97,600,000
			<b>1,435,924,000</b>
5	Rifyal Djusdai, S.Si Nip. 19830926 200901 1 004	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan</b>	<b>1,435,924,000</b>



NO	NAMA / NIP	JABATAN / URAIAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
		<b>A. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	1,436,924,000
		<b>I. Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	1,436,924,000
		1 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,390,144,000
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	45,780,000
			30,437,000
6	Viki Siswantro, SKM NIP. 19860909 201001 1 005	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan</b>	18,437,000
		<b>A. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	18,437,000
		<b>I. Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	18,437,000
		1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12,000,000
		<b>B. PROGRAM PENGEDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN</b>	12,000,000
		<b>I. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	12,000,000
		1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	
			7,724,099,000
7	Syukraldi Arlen, S.Pd Nip. 19720126 199303 1 003	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan</b>	7,724,099,000
		<b>A. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	7,724,099,000
		<b>I. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	7,724,099,000
		1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			7,326,881,000
8	Ajisman, ST NIP. 19681210 200701 1 008	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	223,904,000
		<b>A. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	10,010,000
		<b>I. Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	10,010,000
		1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		<b>II. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	213,894,000
		1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	63,894,000
		2 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	150,000,000
		<b>B. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	4,549,489,800
		<b>I. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	9,625,000
		1 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	9,625,000
		<b>II. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	4,539,864,800
		1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4,539,864,800
		<b>C. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	2,553,487,200
		<b>I. kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	2,553,487,200
		1 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2,543,667,200
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	9,820,000
C.	<b>Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) SKPD</b>		
1	Oka Prasena Labis, ST Nip. 19791016 200801 1 004	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-OPD)</b>	

NAMA / NIP	JABATAN / URAIAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
2 Yhon Suhitman, ST NIP. 19750327 200312 1 003	Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman (Belanja Tidak Langsung dan Langsung)	22,286,650,119
	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK-Unit)</b>	
	Seluruh Program dan Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	7,326,881,000
<b>D. Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan (Pembantu PPK) SKPD</b>	<b>Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-OPD)</b>	
1 Rita Zahara, S.Sos Nip. 19701230 199403 2 006	Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman (Belanja Tidak Langsung dan Langsung)	22,286,650,119
<b>E. Pembantu Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Pembantu Bendahara</b>	
1 Yunina Nip. 19820620 200901 2 003	Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman (Belanja Tidak Langsung dan Langsung)	22,286,650,119
<b>F. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (Rutin)</b>		
1 Alfaritsi, A.Md Nip. 19720428 200501 1 005	Untuk Kegiatan yang bersifat rutin pada OPD	

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 2 Juni 2022

K KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. Yunitre Yunitrman, ST, M.Si  
NIP. 19690622 199701 2 001